

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN ANGGARAN
2023**



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Anugerahnya sehingga Sekretariat Daerah Kota Makassar telah berhasil Menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerbitan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Kami harapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi salah satu evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini

Makassar, 23 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP.,M.PUB.POL
Pangkat: Pembina Tk. II/IV.b
NIP. 19810702 199912 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar yang memuat hal-hal sebagai berikut pendahuluan, Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sekrertariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 2 (dua) sasaran dengan 20 (dua puluh) indicator sasaran hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indicator kinerja sebesar 82,8% atau dengan kategori penilaian **Baik**.
2. Untuk Mencapai indikator sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja,
3. Dengan demikian kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar yang telah dicapai dikategorikan rendah, dikarenakan beberapa kegiatan yang sebelumnya dilakasnakan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tidak terlaksana sepenuhnya.
4. Faktor-Faktor Penghambat sehingga tidak tercapainya target kinerja dapat menjadi perhatian untuk keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah kedepannya. Dengan adanya komitmen Bersama dalam menyukseskan program-program prioritas Sekretariat daerah klota makassar yang ditunjukkan dengan keterserdian dana yang cukup memadai, demikian pula sarana dan prasarana.
5. Selain itu terdapat capaian kinerja lainnya antara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS DAN FUNGSI	4
C. PERMASALAHAN UTAMA	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. TUJUAN DAN SASARAN	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
C. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	57
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. REKOMENDASI	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercermin dari evolusi paradigma pemerintahan di Indonesia yang semakin mengutamakan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kerangka hukum yang mengatur evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara sistematis. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penerbitan SAKIP menjadi tonggak penting dalam menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mengukur kinerja instansi pemerintah, SAKIP menjadi instrumen yang strategis untuk merespons dinamika tuntutan publik dan global serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan SAKIP Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyajikan panduan yang komprehensif dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini memberikan arah teknis yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa perjanjian kinerja terwujud secara efektif, pelaporan kinerja dilakukan dengan transparan, dan proses reviu berlangsung secara akurat. Keseluruhan, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota

Makassar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat daerah kota Makassar Kota Makassar Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah..

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- d. mengoordinasikan pengkajian dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
- f. membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tata laksana;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah;
- h. memberikan pelayanan teknis kepada walikota dan wakil walikota;
- i. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas lingkup Asisten;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli walikota;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD;\
- l. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) dan perjanjian kinerja serta segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- m. mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup sekretariat Daerah;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- r. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan,
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan,
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 - 3) Bagian Hukum,
 - 4) Bagian Kerjasama,
- c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial,
 - 1) Bagian Perekonomian,
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terd
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - 4) Bagian Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - 2) Bagian Umum, terdiri atas :
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - 4) Bagian Protokol,:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia PNS dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah pegawai pada Setda Kota Makassar dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan

No	Bagian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat			1		5	4		10
2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan					12	3		15
3.	Bagian Umum	1	3	10	1	29	20		64
4.	Bagian Organisasi					6	4		10
5.	Bagian Protokol			4		9	3		16
6.	Bagian Tata Pemerintahan			1		5	6		12
7.	Bagian Kesra					8	4		12
8.	Bagian Hukum			1		11	5		17
9.	Bagian Kerjasama			1		6	2		9
10.	Bagian Perekonomian					4	6		10
11.	Bagian Administrasi Pembangunan			2	1	7	2		12
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			1	1	27	10		39
Jumlah		1	3	21	3	129	69	-	226

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, menurut Pangkat/Golongan

No	Bagian	Pangkat/gol.				Jumlah PNS
		I	II	III	IV	
1.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat		2	4	4	10
2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan			13	2	15
3.	Bagian Umum	3	19	24	18	64
4.	Bagian Organisasi			9	1	10
5.	Bagian Protokol	1	3	9	3	16
6.	Bagian Tata Pemerintahan		2	5	5	12
7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat			8	4	12
8.	Bagian Hukum		1	14	2	17
9.	Bagian Kerjasama		1	8		9
10.	Bagian Perekonomian			6	4	10
11.	Bagian Administrasi Pembangunan		1	9	2	12
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		2	34	3	39
Jumlah		4	31	143	##	226

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar menurut jenis kelamin

No	Bagian	Jumlah PNS		Jumlah
		Lak- laki	Perempuan	
1.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat	7	3	10
2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	8	15
3.	Bagian Umum	42	22	64
4.	Bagian Organisasi	3	7	10
5.	Bagian Protokol	11	5	16
6.	Bagian Tata Pemerintahan	9	3	12
7.	Bagian Kesra	7	5	12
8.	Bagian Hukum	7	10	17
9.	Bagian Kerjasama	5	4	9
10.	Bagian Perekonomian	5	5	10
11.	Bagian Administrasi Pembangunan	3	9	12
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	19	20	39
Jumlah		125	101	226

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dari 4 program Sekretariat Daerah Kota Makassar permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang dituangkan kedalam tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

1.

1) Faktor Pendorong :

- a. dari kegiatan ini yakni tersedianya anggaran yang cukup serta program kegiatan yang tahun sebelumnya dilaksanakan;
- b. dalam Kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan rapat, proses penyebarluasan Produk Hukum dan kegiatan tetap berjalan
- c. dari Kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang cukup, kerjasama pimpinan dan staf yang efektif serta koordinasi yang intensif dengan calon mitra/mitra kerjasama dan stakeholder lainnya.

2) Faktor Penghambat :

- a. Sebagian anggaran pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan dirasionalisasikan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 sehingga baru akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023;
- b. Pergantian Pejabat Pengadaan yang menyebabkan keterlambatan proses belanja melalui e-Katalog;
- c. Sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada anggaran perubahan setelah pengesahan Anggaran Perubahan, Permintaan Dana Panjar Kegiatan biasanya terlambat karena penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana panjar sebelumnya sering terlambat sehingga kita tidak bisa mengajukan dana panjar berikutnya baik TU ataupun GU.
- d. dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara adanya kerjasama dengan unsur Advokasi sebagai tim narasumber dan

unsur dari pihak tim ahli dalam setiap penanganan perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar dan dengan berkolaborasi bersama SKPD terkait, sehingga proses kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain.

3) Tindak Lanjut :

- a. yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif;
- b. yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan:

1) Faktor pendorong :

- a. dari program ini adalah koordinasi dan komunikasi dengan BUMD/BLUD dan instansi terkait lainnya yang terjalin dengan baik;
- b. yang mendukung pencapaian kinerja dari Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan ini adalah koordinasi-koordinasi yang intensif dengan perangkat-perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassa.

2) Faktor penghambat :

- a. dimana kita ketahui ada program prioritas pemerintahan kota yaitu pembentukan Maksassar Incorporate yang penganggarannya cukup besar yang masih berproses revisi setelah menerima hasil penilaian dari kementerian dalam negeri;
- b. Juga masih terbatasnya jumlah pegawai yang malakukan tugas tugas kedinasan yaitu dalam rangka penyelenggaraan pengendalian distribusi serta pengawasan usaha mikro, serta terbatasnya sarana dan prasarana kantor yang ada di bagian perekonomian untuk mendukung optimalnya setiap kegiatan yang kita laksanakan;
- c. pencapaian kinerja fisik dan keuangan yaitu sekitar 80% anggaran pada sub kegiatan ini diperuntukkan untuk kegiatan fasilitasi TSLP, sementara pelaksanaan fasilitasi TSLP belum terlaksana sampai dengan akhir triwulan III karena SK Tim Dewan TSLP baru rampung diakhir triwulan III, sehingga berimbas pada keterlambatan penyusunan LPJ kegiatan tersebut.

3) Tindak lanjut:

- a. disarankan melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna mengoptimalkan pencapaian target dan realisasi perencanaan serta mendayagunakan sumber daya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. yang diperlukan adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar;

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat:

1) Faktor pendorong :

- a. Kegiatan ini yakni Koordinasi dengan para stakeholder dan lembaga kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik demikian pula halnya proses pecairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan semua berjalan lancar atas kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga pada realisasi TW IV BPM Masuk Kategori tertinggi Peringkat 3 sebesar 90.46 %.

2) Faktor penghambat :

- a. pencapaian yaitu adanya pergeseran anggran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan parsial 3 sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda menunggu setelah semua administrasi selesai;

3) Tindak lanjut :

- a. Melakukan Koordinasi secara efektif dengan para stakeholder.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor Penghambat :

- a. adalah pengenalan baru terhadap pengadaan dengan metode E-Katalog yang cukup menyita waktu dalam pelaksanaannya yang mana hal ini adalah metode yang baru diterapkan
- b. dari pencapaian kegiatan ini adalah terhambatnya proses realisasi keuangan pada saat Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sipabaji dan terdapat beberapa perbaikan oleh pejabat pengadaan yang perlu disesuaikan dengan regulasi, terdapat perubahan alokasi anggaran kas yang mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran parsial

Faktor Pendukung :

- a. dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah anggaran yang cukup tersedia yang didukung oleh SDM yang cukup kompeten pada bidang tugasnya
- b. dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas

Tindak Lanjut :

- a. disarankan untuk kedepannya adalah SDM perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif.

disarankan untuk tahun selanjutnya akan mengantisipasi setiap perubahan yang ada baik dari sistem aplikasi yang berubah maupaun regulasi yang mengalami perubahan, serta memperkuat koordinasi kepada semua pemangku kepentingan khususnya proses pengelolaan keuangan daerah

Dari 4 (Empat) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar memiliki 20 (Dua Puluh) target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja **82.83%** atau dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Sekretariat Daerah yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan gambaran umum dan permasalahan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

i. Capaian Kinerja Organisasi

Berisikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

ii. Realisasi Anggaran

Berisikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka menunjang pencapaian program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Status Laporan Penyelenggaraan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			2 Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan
			3 % Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			4 % Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan	100%	100%	100%	100%	100%
			5 % Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian Jumlah BUMD yang berkinerja	100%	100%	100%	100%	100%
			6 % Penyerapan Realisasi Anggaran melalui SISMOITEPRA	90%	90%	90%	90%	90%
			7 Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
			8 Terselenggaranya Kegiatan- kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan
			1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
			2 Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen
			3 % Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			4 % Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	100%	100%	100%	100%
5 % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
6 % Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%			
7 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
8 % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%			
9 % Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	100%	100%	100%	100%	100%			
10 % Terfasilitasinya Kerumahahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
11 Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%			
12 Jumlah Pelayanan Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan			

Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 diuraikan sebagaimana **terlampir**.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Makassar

TUJUAN	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	Persentase	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	4 Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Instansi/Lembaga/ Perangkat daerah	12 Kegiatan	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah rapat koordinasi pelaksana tugas bidang kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	4 Kegiatan	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Dokumen Penetapan Kode dan Data Kewilayahan	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah	168 Kec/Kel	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan wilayah	5 kec/ kel	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan penegasan batas wilayah	42 kec/ kel	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah Kelurahan yang dilakukan pemantapan penyelenggaraan dana kelurahan	153 Kel	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah keputusan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat	4 Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan	15 laporan	Bagian Tata Pemerintahan

		Jumlah dokumen laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersusun	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun walikota	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah peralatan komputer jaringan sistem informasi E-LPPD dan E-Eppd	4 unit	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah usul dan keputusan pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kota	6 dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah usul dan surat lain/cuti KDH/WKDH	6 dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan/ Kebijakan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	22 kegiatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	5 kebijakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	5 kebijakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	120 PRODUK HUKUM	Bagian Hukum
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	12 PERKARA	Bagian Hukum
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	120 PRODUK HUKUM	Bagian Hukum
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	Persentase	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani.	20 dokumen kerjasama	Bagian Kerjasama
		Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang mempunyai rekomendasi dari Tim Koordinasi.	20 dokumen kerjasama	Bagian Kerjasama
		Jumlah Kesepakatan Kerjasama yang tercapai.	20 dokumen kerjasama	Bagian Kerjasama
		Forum infestasi luar negeri.	2 Forum Kerjasama	Bagian Kerjasama
		Jumlah dokumen kerjasama luar negeri.	2 Dokumen Kerjasama	Bagian Kerjasama

		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kerjasama luar negeri.	1 Laporan	Bagian Kerjasama
		Buku Potensi Kerjasama.	100 Exemplar	Bagian Kerjasama
		Jumlah laporan dan data kerjasama secara berkala yang didokumentasikan.	1 laporan	Bagian Kerjasama
		Monev Kerjasama Luar Negeri	1 laporan	Bagian Kerjasama
Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	Persentase	Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD	26 laporan BUMD/BLUD	Bagian Perekonomian
		Jumlah pelaksanaan kegiatan asesment BLUD dan BUMD	2 kegiatan	Bagian Perekonomian
		Jumlah rapat koordinasi khusus sosialisasi, workshop, bimtek lingkup BLUD dan BUMD Kota Makassar	4 kali	Bagian Perekonomian
		Tersusunnya dokumen bisnis plan dan corporate plan/RKAP BUMD dan BLUD	12 dokumen	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan informasi dan rekomendasi distribusi dan pengendalian perekonomian	2 Laporan	Bagian Perekonomian
		Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	4 kali	Bagian Perekonomian
		Jumlah kegiatan sosialisasi/FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian	2 kegiatan	Bagian Perekonomian
		Jumlah rapat koordinasi	4 kali	Bagian Perekonomian
		Jumlah peserta yang diedukasi	180 orang	Bagian Perekonomian
		Jumlah Laporan informasi dan rekomendasi terkait perencanaan dan pengawasan usaha mikro kecil	2 laporan	Bagian Perekonomian
		Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan	Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang di fasilitasi
Jumlah CSR yang di fasilitasi	1 dokumen			Bagian Administrasi Pembangunan
Jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi	1 dokumen			Bagian Administrasi Pembangunan
Jumlah SKPD yang mendapatkan DAK	1 dokumen			Bagian Administrasi Pembangunan

			% SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi SISMONTEPRA tepat waktu	100%	Bagian Administrasi Pembangunan
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani	200 paket	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan	7 fungsi layanan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi yang dilaksanakan, jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan barang dan jasa	6 kegiatan dan 15 SKPD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Terselenggaranya Kegiatan@kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153	Kelurahan	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan, RT/RW dan PKK	153 kelurahan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
			Terselenggaranya pembinaan LPM dan peningkatan peran kelembagaan dalam kegiatan pengembangan kelurahan	153 kelurahan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
			Terselenggaranya sayembara dan pembinaan kelompok TTG	153 kelurahan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat daerah yang disusun	2 dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	60 Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	25 dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah bulan bulan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			% Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian yang terverifikasi	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan

		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah kegiatan penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	4 kegiatan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun	12 laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah pimpinan dan keluarga yang mendapatkan jasa perawatan kesehatan (Medical check-up)	8 orang	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	Bagian Umum
		Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4 dokumen	Bagian Umum
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	Jumlah pakain dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	2192 stel	Bagian Umum
		terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	120 orang	Bagian Umum
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	Jumlah komponen instalasi listik/penerangan bangunan gedung yang diadakan	36 jenis	Bagian Umum
		jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 jenis	Bagian Umum
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2.112 bahan bacaan	Bagian Umum
		Jumlah kunjungan tamu pemerintah kota Makassar yang di fasilitasi	200 kunjungan	Bagian Umum
		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141 perjalanan	Bagian Umum
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah mobileur yang diadakan	10 jenis	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	17 jenis	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	10.500 surat	Bagian Umum
		Jumlah penyediaan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik	12 bulan	Bagian Umum
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	Bagian Umum
		Jumlah tenaga kebersihan yang terlibat dalam kebersihan kantor	300 orang	Bagian Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara	10 unit	Bagian Umum
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara	439 unit	Bagian Umum
		Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 gedung kantor	Bagian Umum
		Jumlah bangunan / gedung yang peralatan dan mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	6 bangunan/gedung	Bagian Umum
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6 bangunan/gedung	Bagian Umum
Terfasilitasinya Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah	1 rumah jabatan	Bagian Umum
		Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	1 rumah jabatan	Bagian Umum
		Jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	1 rumah dinas	Bagian Umum

	Terlaksananya Penataan Organisasi	Persentase	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan	5 dokumen	Bagian Organisasi
			Jumlah Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan	5 dokumen	Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen 'Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	2 dokumen	Bagian Organisasi
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	Pelayanan	Jumlah pelayanan Fasilitas Keprotokoleran Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan keprotokoleran	840 Pelayanan	Bagian Protokol
			Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	320 Pelayanan	Bagian Protokol
			Jumlah Pendokumentasian Kegiatan Tugas Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	240 dokumen	Bagian Protokol

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya, Rencana kinerja secara formal dan detail untuk Tahun 2023 telah dibuat dalam Rencana Kerja. Sekretariat Daerah Kota Makassar juga telah membuat dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan perjanjian kinerja antara seluruh Kepala Bagian dengan Sekretaris Daerah dan antara Sekretaris Daerah dengan Walikota Makassar. Dalam dokumen perjanjian kinerja ini ditetapkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan komitmen seluruh Bagian untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Sekretariat Daerah Kota Makassar sepenuhnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar	100%
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

	Terlaksananya Pemeliharaan Barang	100%
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja program utama dengan target yang telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan berdasarkan pada indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Selain pengukuran atas pencapaian target LAKIP juga menyajikan analisis kinerja atas hasil dari program utama yang telah dicapai dengan melakukan analisis perbandingan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya (*trend analysis*). Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dilakukan dengan melihat selisih antara target dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Perbedaan selisih tersebut akan digunakan untuk melihat strategi pemecahan dan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja mengalami perubahan target kinerja.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- a) Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	% REALISASI	% CAPAIAN	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
		Administrasi Tata Pemerintahan					
		Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	Bagian Tata Pemerintahan	86,70	100,00%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Kebijakan/100%	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	94,80	100,00%	
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Bagian Hukum	94,66	97,78%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah					
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		100%	Bagian Kerjasama	77,63	88,89%		
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri							
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							
Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	Bagian Perekonomian	80,49	94,38%		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						
Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	12 Kegiatan/100%	Bagian Administrasi Pembangunan	93,66	100,00%		
Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	79,89	100,00%		
Terlaksananya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	153 Kelurahan/100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	89,63	100,00%		
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						

Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	79,97	100,00%
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	74,85	91,67%
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	74,18	66,67%
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Bagian Umum	91,97	100,00%
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	Bagian Umum	79,46	87,62%
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Bagian Umum	94,45	76,27%
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Bagian Umum	88,05	376,08%
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Bagian Umum	92,20	58,86%
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Bagian Umum	77,13	68,35%
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	Bagian Umum	97,18	75,00%
	Terlaksananya Penataan Organisasi	Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	Bagian Organisasi	88,40	100,00%
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolalan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	Bagian Protokol	91,10	100,00%

Penjelasan :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi ke 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.13,183,130,900 Menjadi Rp.13.683.130.900 ,Tambahan sebesar Rp.500.000.000, Pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah Kota Makassar sesuai SK Gubernur Nomor : 602/III/Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023. sampai bulan Juni Tahun 2023 telah melakukan pergeseran anggaran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan parsial 3 (BKK) dan anggaran perubahan menjadi Rp. 13.589.988.600 telah terealisasi sampai bulan Desember Rp. 11.362.885.021 ,- dengan realisasi fisik dari 153 Kelurahan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 83.61%.
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.6,663,554,800,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah melakukan pergeseran anggaran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan anggaran perubahan sebesar Rp, 6.565.957.200 realisasi sampai bulan Desember sebesar Rp. 6.483.312.264,- dengan realisasi fisik dari 153 Kelurahan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98.74%.
- c. Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2,790,601,400,- telah melakukan pergeseran anggaran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan anggaran perubahan Rp. 2.548.113.400 sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 2.503.912.517,- dengan realisasi fisik dari 15 Kelompok Teknologi Tera Guna sampai berakhirnya tahun 2023. realisasi fisik hingga bulan

Desember 2023 15 Kelompok sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98.27%.

Adapun **faktor pendukung** dari Kegiatan ini yakni Koordinasi dengan para stakeholder dan lembaga kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik demikian pula halnya proses pecairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan semua berjalan lancar atas kerjasama antar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga pada realisasi TW IV BPM Masuk Kategori tertinggi Peringkat 3 sebesar 90.46 % , adapun **faktor penghambat** dan pencapaian yaitu adanya pergeseran anggaran parsial 2 (kesalahan penempatan rekening belanja) dan parsial 3 sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda menunggu setelah semua administrasi selesai.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 12 (Dua Belas) Kegiatan yaitu

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Fasilitas Kerumahraggan Sekretariat Daerah.
- 11) Penataan Organisasi.
- 12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 222.173.800,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.191.570.004.,- dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 (1 dokumen) dan Rencana Kerja Tahun 2024 (1 dokumen), sampai saat ini 2 dokumen tersebut telah dilaksanakan. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86.23%.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.33.701.970,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah

teralisasi sebesar Rp.19.766.000, dengan realisasi fisik dari 60 rangkap dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa 2 (dua) jenis dokumen RKA-SKPD yaitu dokumen RKA-SKPD Perubahan 30 rangkap dan RKA-SKPD Pokok 30 rangkap, sampai saat ini telah dilaksanakan pencetakan 30 rangkap dokumen RKA-SKPD Perubahan TA.2022 dan 30 rangkap RKA SKPD Pokok 2024. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 58.65%.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.45.595.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.32.344.000,- dengan realisasi fisik dari 25 rangkap dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa 2 (dua) jenis dokumen DPA-SKPD yaitu dokumen DPA-SKPD Pokok sebanyak 12 rangkap dan dokumen DPA-SKPD Perubahan sebanyak 13 rangkap, sampai saat ini telah dilaksanakan pencetakan 25 rangkap dokumen DPA-SKPD Pokok dan Perubahan TA.2023. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 70.94%.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.24.422.300,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.19.173.500,- dengan realisasi fisik dari 3 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa 1 dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, 1 dokumen SK. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, dan 1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, sampai saat ini 3 dokumen tersebut telah dilaksanakan. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 78.51%.
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.39.290.500,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.29.186.500,- dengan realisasi fisik dari 4 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini ada 4 laporan yang terlaksana yaitu 1 laporan triwulan I, 1 laporan triwulan II, 1 Laporan Triwulan III dan 1 laporan triwulan IV Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74.28%.

Adapun **Faktor Pendukung** dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah anggaran yang cukup tersedia yang didukung oleh SDM yang cukup kompeten pada bidang tugasnya. Sedangkan **Faktor Penghambatnya** adalah pengenalan baru terhadap pengadaan dengan metode E-Katalog yang cukup menyita waktu dalam pelaksanaannya yang mana hal ini adalah metode yang baru diterapkan, sehingga **Tindaklanjut** yang disarankan untuk kedepannya adalah SDM perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.39.846.447.422,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.29.640.244.783,- dengan realisasi fisik dari 14 bulan (14 kali) yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini ada 14 bulan (14 kali) yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74.39%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.265.115.800,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.1.918.683.978 ,- dengan realisasi fisik dari 12 bulan (12 kali) yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terlaksana sebanyak 12 bulan Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84.71%.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.930.391.300,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.773.865.146,- dengan realisasi fisik dari 100% yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah realisasi fisik telah dilaksanakan dan mencapai sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 83.18%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.34.755.200,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.23.927.500,- dengan realisasi fisik dari 5 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa, 1 Laporan Arus Kas (LAK), 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 1 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 1 Laporan Operasional (LO), dan 1 Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sampai saat ini sementara dalam tahap penyusunan. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68.85%.
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.295.721.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.99.024.600,- dengan realisasi fisik dari 4 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa laporan bahan tanggapan atas pemeriksaan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat *external auditor pemerintah* yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) , sampai saat ini ada 2 laporan yang telah dilaksanakan berupa bahan tanggapan

Inspektorat Kota Makassar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 33.49%.

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.296.922.300,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.230.702.866,- dengan realisasi fisik dari 12 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Fungsional Bendahara Pengeluaran per bulan, sampai saat ini telah dibuat 12 laporan bulanan Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 77.70%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas. Untuk **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah terhambatnya proses realisasi keuangan pada saat Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sipabaji dan terdapat beberapa perbaikan oleh pejabat pengadaan yang perlu disesuaikan dengan regulasi, terdapat perubahan alokasi anggaran kas yang mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran parsial. Dan **Tindakan lanjut** yang disarankan untuk tahun selanjutnya akan mengantisipasi setiap perubahan yang ada baik dari sistem aplikasi yang berubah maupaun regulasi yang mengalami perubahan, serta memperkuat koordinasi kepada semua pemangku kepentingan khususnya proses pengelolaan keuangan daerah.

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yakni:

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.520.627.696,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.315.685.958,-, dengan realisasi fisik dari 8 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini sudah terlaksana 13 unit Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86.52.%.
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.166.241.100,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 4.834.307.520,- dengan realisasi fisik dari 4 paket yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini sudah terlaksana 4 paket. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93.57%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD) Di sisi lain **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir namun diharapkan telah terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.754.830.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 2.569.032.000,- dengan realisasi fisik dari 2192 Stel/Pasang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sehingga sampai saat ini telah terealisasi 2133 Stel/Pasang. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93.26%.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.884.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.117.046.287 ,- dengan realisasi fisik dari 120 orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terlaksana 71 Orang. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 50.83% dan realisasi keuangan sebesar 59.29%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD). Di sisi lain **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir, namun diharapkan akan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.269.799.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp,839.764.530- dengan realisasi fisik dari 36 Paket yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terlaksana 36 Paket. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi Fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 66.13%.
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 325.440.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp,117.990.000- dengan realisasi fisik dari 2.112

Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini yang terealisasi sebanyak 2.112 Dokumen Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 81.39% dan realisasi keuangan sebesar 50.21%.

- c. Fasilitas Kunjungan Tamu, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.27.886.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp27.815.384.031,- dengan realisasi fisik dari 200 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini terealisasi 200 Laporan Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.75%.
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.094.500.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.132.032.224 dengan realisasi fisik dari 141 Laporan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi 141 Laporan. Sehingga untuk sub kegiatan Ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi keuangan sebesar 54.05%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD). Di sisi lain **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir, namun diharapkan akan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 36.760.643.000- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 32.015.045.627 ,- dengan realisasi fisik dari 20 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 20 Unit Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87.09%.
- b. Pengadaan Mebel, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.151.989.500,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 2.021.393.330.- dengan realisasi fisik dari 10 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10 Unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93.93%.

- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.452.795.852,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.10.308.782.790,- dengan realisasi fisik dari 17 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 17 Unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90.01%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD). Di sisi lain **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir, namun diharapkan akan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan yaitu;

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.378.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 352.802.000,- dengan realisasi fisik dari 10500 Surat yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10.500 Laporan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86.19%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.152.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3.617.934.998,- dengan realisasi fisik dari 12 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 12 Laporan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 60.30%.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 25.654.500.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 25.474.692.050,- dengan realisasi fisik dari 10 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10 Laporan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 47% dan realisasi keuangan sebesar 99.30%.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.320.168.400,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.2.256.124.000,- dengan realisasi fisik dari 300 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi

sebanyak 300 Laporan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 67% dan realisasi keuangan sebesar 97.24%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Milik Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.315.597.150,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.984.854.489,- dengan realisasi fisik dari 10 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10 unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 90% dan realisasi keuangan sebesar 74.86%.
- 2) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.12.738.891.250,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.8.843.476.783,- dengan realisasi fisik dari 439 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 439 Unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 68% dan realisasi keuangan sebesar 69.42%.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.657.669.400,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.2.333.344.120,- dengan realisasi fisik dari 6 Bangunan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 6 bangunan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87.80%.
- 4) Penyediaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.000.370.344,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.6.127.322.784,- dengan realisasi fisik dari 6 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 6 Unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 17% dan realisasi keuangan sebesar 87.53%.

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.185.128.720,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.164.965.710,- dengan realisasi fisik dari 14 bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini ada 14 Bulan (14 kali) yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini,

realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89.11%.

- b. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.0,- dengan realisasi fisik dari 8 Orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini belum ada yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
- c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.038.046.000,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.2.285.165.000,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini ada 12 Bulan yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 75.22%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dan kewajiban negara kepada kepala daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga wajib menganggarkan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000. Untuk **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini khususnya terjadi pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana beliau belum berencana untuk menggunakan anggaran tersebut. Dan **tindaklanjut** yang disarankan untuk tahun selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga beliau sesuai peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) subbagian, yaitu:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.13.908.474.700,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.13.555.722.000,- dengan realisasi fisik dari 1 Paket yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi 1 Paket. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 97.46%.
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.8.377.601.540,- yang telah terealisasi sampai bulan

Desember Tahun 2023 sebesar Rp.7.830.202.055,- dengan realisasi fisik dari 1 Paket yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi 1 Paket. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 93.47%.

- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.16.992.406.140,- yang telah terealisasi sampai bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp.16.784.777.607,- dengan realisasi fisik dari 1 Paket yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023, sampai saat ini telah terealisasi 1 Paket. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 75% dan realisasi keuangan sebesar 98.78%.

k. Penataan Organisasi

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp650.061.800,- Dari Bulan Oktober sampai Bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp622.755.996,-, dengan realisasi kinerja dari 5 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya Tahun 2023. Sampai saat ini dokumen yang dilaksanakan yaitu Perda Perangkat Daerah; Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Analisis Beban Kerja; Informasi Struktur Jabatan/ Evaluasi Jabatan; Standar Kompetensi Jabatan dan Laporan Kegiatan Evaluasi Kelembagaan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga Bulan Desember Tahun 2023 sebanyak 5 dokumen atau sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp622.755.996,- atau 95.80%.
- b. Program Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp902.340.900,- Dari Bulan Oktober sampai Bulan September Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp682.497.349,- dengan realisasi kinerja dari 5 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya Tahun 2023. Sampai saat ini telah terlaksana 5 dokumen yaitu dokumen Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah; Survey Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Perangkat Daerah; Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga Bulan Desember Tahun 2023 sebanyak 5 dokumen atau sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp682.497.349, atau 75.64%.
- c. Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp713.802.900,- dari Bulan Oktober sampai Bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp698.020.244,- dengan realisasi fisik dari 2 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya Tahun 2023. Sampai saat ini dokumen yang terlaksana yaitu: Laporan LKJIP dan Roadmap

Reformasi Birokrasi SKPD. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga Bulan Desember Tahun 2023 sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp698.020.244,- atau 97.79%.

Faktor pendukung dari kegiatan ini adalah proses pelaksanaan kegiatan tetap terlaksana dengan dukungan anggaran dari APBD.

Adapun **faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah:

- data dari SKPD yang terlambat;
- data perencanaan dan pelaporan di SKPD- SKPD yang masih belum relevan;
- waktu untuk coaching inovator yang terbatas;
- dan SKPD masih kurang perhatian untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Tindak lanjut yang disarankan yaitu:

- permintaan data dilakukan secara terus menerus;
- mengadakan asistensi tingkat SKPD terkait sinkronisasi perencanaan dan pelaporannya;
- mengadakan coaching ke inovator yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

serta berupaya agar pemenang inovator tingkat nasional mendapatkan reward dari pimpinan.

I. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitas Keprotokolan

Pelaksanaan Fasilitas Keprotokolan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Jumlah pelayanan Fasilitas Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar yang Mendapat Layanan Keprotokolan dengan target 100%.

Untuk Triwulan IV Tahun 2023 Pelaksanaan Fasilitas Keprotokolan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.834.513.920 dengan realisasi sebesar Rp. 12.005.442.956 atau 86,78%. Fasilitas Keprotokolan memiliki indikator kinerja, yaitu Jumlah Pelayanan Fasilitas Keperotokolan Pemerintah Kota Makassar yang Mendapat Layanan Keprotokolan dengan Capaian Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 93,26% dengan predikat tinggi.

b. Fasilitas Komunikasi Pimpinan

Pelaksanaan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan indikator sebagai berikut :

Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan target 100%.

Untuk Triwulan IV Tahun 2023 Pelaksanaan Fasilitas Komunikasi Pimpinan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.757.100 dengan realisasi sebesar Rp. 435.237.750 atau 98,75%. Rata2 capaian kinerja 92,50% dengan predikat tinggi

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan indikator :

Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan target 100%.

Untuk Triwulan IV Tahun 2023 Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.366.795.200 dengan realisasi sebesar Rp. 10.919.758.938 atau 96,07%. Rata2 capaian kinerja 97,92% dengan predikat tinggi.

Beberapa **faktor penghambat** pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar selama Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

Secara garis besar, dalam penyerapan tahun anggaran 2023 kami tidak mengalami kendala yang besar atau signifikan, adad beberapa kode rekening belanja yang tidak bisa kami maksimalkan sepenuhnya, terutama untuk satu kode rekening belanja pada sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan yang nilai anggarannya besar dan tidak bisa diserap maksimal. Dalam hal ini Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri yang jumlah pagunya mencapai Rp. 1.200.000.000 dan hanya mampu dicairkan sebesar Rp. 589.727.696 dengan sisa anggaran Rp. 610.272.304.

Adapun **faktor pendukung** terhadap capaian realisasi selama Triwulan IV adalah kerjasama Pimpinan dan Staf yang tetap efektif dalam menjalankan Pelayanan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan serta optimalisasi penyerapan anggaran.

Tindak lanjut yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Proses Pemberkasan untuk Pencairan hingga batas waktu yang ditentukan
2. Mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran untuk belanja lainnya.

Jadi rata-rata capaian kinerja dan anggaran Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar selama triwulan III tahun 2023 yaitu:

- ❖ Capaian Kinerja : 94,56%
- ❖ Capaian Anggaran : 91,10%

Predikat kinerja : tinggi

3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH & KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program ini terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Fasilitasi Kerjasama Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan kedalam sub-sub kegiatan sebagai Berikut:

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda.Kota Makassar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) Sub kegiatan dari 14 (empat belas) Header pada anggaran pokok dan setelah anggaran perubahan menjadi 13 (tiga belas) Header. Dalam program ini pencapaian target indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 8.671.229.500,00 dan setelah anggaran perubahan

menjadi Rp 8.418.205.500,00. Adapun capaian realisasi pada triwulan IV sebesar Rp 7.306.260.519,00. atau 86,79%. Rata-rata capaian kinerja dengan predikat kinerja Tinggi. Adapun rincian capaian dari setiap Sub Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai berikut:

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.

a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan

Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan didukung pagu pokok sebesar Rp 281.524.200,00 dan pagu perubahan Rp 230.389.800,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember Rp 201.888.324,00 atau 87,63%. Rata-rata capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori tinggi.

Adapun **faktor-faktor penghambat** pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Kota Makassar selama Triwulan IV Tahun 2023 yaitu:

1. Sebagian anggaran pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan dirasionalisasikan pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 sehingga baru akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023.
2. Pergantian Pejabat Pengadaan yang menyebabkan keterlambatan proses belanja melalui e-Katalog.

b. Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.

Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan didukung pagu pokok sebesar Rp 4.256.149.500,00 dan pagu perubahan Rp 3.993.863.500,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 3.670.980.923,00 atau 91,92%. Rata-rata capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori tinggi.

Adapun **faktor-faktor penghambat** pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kota Makassar selama Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kecamatan dan Kelurahan mengalami rasionalisasi anggaran tahun 2023, sehingga baru dilaksanakan pada bulan November 2023.
2. Pergantian Pejabat Pengadaan yang menyebabkan keterlambatan proses belanja melalui e-Katalog.

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah didukung pagu pokok sebesar Rp 4.133.555.800,00 dan pagu perubahan Rp 4.193.952.200,00. Adapun realisasi anggaran Rp 3.425.891.272,00 atau 81,69%. Rata-rata capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori tinggi.

Adapun **faktor-faktor penghambat** pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Makassar selama Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Cetak Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dilaksanakan pada bulan November setelah verifikasi oleh Timda Provinsi dan Timnas.
2. Pergantian Pejabat Pengadaan yang menyebabkan keterlambatan proses belanja melalui e-Katalog.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang terbagi atas 3 Sub Kegiatan yaitu : (1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, (2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan (3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat. Jumlah Anggaran setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 59.218.655.500,- . Realisasi Anggaran Sampai akhir tahun anggaran 2023 (Triwulan IV) Sebesar Rp. 56.137.264.496,- atau 94,80 % dan Realisasi Fisik Sebesar 100% dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.205.003.400,- dengan belanja kegiatan sebesar Rp. 28.418.847.400,- dan Belanja Hibah sebesar Rp. 29.786.156.000,- sehingga jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan. Sampai akhir tahun anggaran pada Triwulan ke IV jumlah Realisasi anggaran sebesar Rp. 55.256.804.378,- atau dengan jumlah persentase sebesar 94,93% dengan realisasi Fisik 100% sampai Akhir Desember 2023.
- b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial**, yang didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 555.25.300,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan. Sampai pada Triwulan ke III akhir September 2023 jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 468.388.602,- atau dengan Persentase sebesar 84,30 % dengan Realisasi Fisik 100% sampai Akhir Desember 2023.
- c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat** yang didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 458.026.800,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan. Sampai pada Triwulan ke III akhir September 2023 jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 412.071.516,- atau dengan Persentase sebesar 89,97 % dengan Realisasi Fisik 100 sampai Akhir Desember 2023.

Adapun **Faktor Pendukung** dari kegiatan ini yakni tersedianya anggaran yang cukup serta program kegiatan yang tahun sebelumnya dilaksanakan. Adapun **Faktor Penghambat** dan pencapaian yaitu, Sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan yang

dianggarkan pada anggaran perubahan setelah pengesahan Anggaran Perubahan, Permintaan Dana Panjar Kegiatan biasanya terlambat karena penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana panjar sebelumnya sering terlambat sehingga kita tidak bisa mengajukan dana panjar berikutnya baik TU ataupun GU. Namun **Tindak Lanjut** dari masalah tersebut diatas akan kami Atasi dengan mempercepat penyelesaian LPJ panjar berjalan dengan membuat target penyelesaian berkas cepat dan tepat.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.257.310.900,- sampai bulan Juni Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.184.787.267,- dengan realisasi kinerja dari 120 dokumen yang ditargetkan sampai triwulan keempat sebanyak 116 dokumen tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 96.67% dan realisasi keuangan sebesar 94.23%.

Adapun **faktor pendukung** dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah adanya kerjasama dengan unsur Tenaga Ahli Selaku Narasumber, SKPD terkait selaku pengusul dan Percepatan Fasilitasi di Biro Hukum Pemprov Sul-Sel dan Harmonisasi Di Kementerian Hukum dan Ham Sul-Sel, sehingga proses tetap berjalan. Faktor **penghambat** dari pencapaian kegiatan ini untuk target 120 dokumen belum dapat terpenuhi, untuk saat ini sebanyak 116 dokumen dan semuanya sudah terealisasi dan **tindaklanjuti** yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif. Dari beberapa usulan dari SKPD ke Bagian Hukum untuk difasilitasi.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.829.045.500,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.741.335.102,- dengan realisasi kinerja dari 12 kasus yang ditargetkan untuk sampai triwulan keempat sebanyak 10 kasus tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 142,86% dan realisasi keuangan sebesar 95.20%.

Adapun **faktor pendukung** dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara adanya kerjasama dengan unsur Advokasi sebagai tim narasumber dan unsur dari pihak tim ahli dalam setiap penanganan perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar dan dengan berkolaborasi bersama SKPD terkait, sehingga proses kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain, **Faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah kurangnya berkas dan bukti pendukung dalam penanganan kasus, Dan **tindaklanjuti** yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif.

c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 827.567.200,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 778.895.501,- dengan realisasi kinerja dari 120 dokumen yang ditargetkan untuk sampai triwulan kedua sebanyak 116 dokumen sampai berakhirnya tahun 2023, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan Desember tahun 2023 sebesar 96.67 % dan realisasi keuangan sebesar 94.12%.

Adapun **faktor pendukung** dalam Kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan rapat, proses penyebarluasan Produk Hukum dan kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain, **Faktor penghambat** dari pencapaian kegiatan ini adalah kurangnya berkas dan bukti pendukung dalam penanganan kasus, Dan **tindaklanjut** yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif.

4. Fasilitas Kerjasama Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.892.855.500,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.6.418.091.698,- atau 81,32% dengan realisasi fisik dari 20 Dokumen Kerjasama yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023 telah tercapai 40 Dokumen Kerjasama tahun 2023 atau 100% fisik, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Makassar tentang Sinergi Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun Anggaran 2023 tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Cokroaminoto Makassar tentang Praktik Klinik Kebidanan;
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Lamappapoleonro tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Bone tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Buq'atun Mubarakah Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar dan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Imam Ashim dan Yayasan Serambi Madinah

- Indonesia (Yasmin) dan Yayasan Markas Imam Malik Tentang Pembinaan Penghafal AlQur'an Di Kota Makassar;
8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Makassar;
 9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Univeristas Kristen Indonesia Paulus tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Univeristas Kristen Indonesia Toraja tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 14. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 15. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia tentang Praktek Kerja Profesi Program Studi S1 Farmasi dan Profesi Apoteker;
 16. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin tentang Praktik Kerja Lapangan;
 17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Andi Djemma Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Muhammadiyah Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Agama Islam Negeri Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Cokroaminoto Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Mega Buana Palopo Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

23. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
24. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Akademi Maritim Palopo Tentang Pelaksanaan Studium Generale "Smart City & Metaverse;
25. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Akademi Keperawatan Sawerigading Pemda Luwu Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
26. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
27. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar tentang Kerja Sama program Pendataan dan Pengembangan UKM di Lorong Wisata, Badan Usaha Lorong dan Koperasi, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (PKM) serta Pemberian Beasiswa Prestasi bagi Anak – Anak yang Domisili di Lorong Wisata;
29. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Program Studi Magister (S.2) Sosiologi Fisip Universitas Hasanuddin tentang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
30. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar tentang Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pancasakti Makassar tentang Pelaksanaan Praktek Klinik Keperawatan;
32. Perjanjian Kerja Sama Antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tentang Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
33. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Save The Children Indonesia tentang Pengembangan Program Circular Geniuses;
34. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak di Sulawesi Selatan;

35. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Kerja Sama dalam melaksanakan Pelatihan Terakreditasi di Bidang Kesehatan;
36. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Waktu Terbatas dan/atau Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
37. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
38. Kesepakatan Bersama antara Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin dengan Pemerintah Kota Makassar tentang Kerja Sama Penanganan Kebakaran di lingkungan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin dan Kota Makassar;
39. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentang Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Command Center;
40. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito;
41. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Mal;
42. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Produk 17 (Tujuh Belas) Usaha Sub-Sektor Ekonomi Kreatif se-Kota Makassar;
43. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) tentang Bimbingan Teknis kepada Tenaga Teknis Kefarmasian di Kota Makassar;
44. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Kerja Sama dalam melaksanakan Pelatihan Terakreditasi di Bidang Kesehatan;
45. Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Makassar tentang

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Makassar;

46. Nota Kesepakatan antara Komisi Nasional Disabilitas dengan Pemerintah Kota Makassar tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Makassar;

47. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Terbuka tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

48. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Makassar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Makassar tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

b. Fasilitas Kerjasama Luar Negeri, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.801.998.100,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.2.906.612.544,- atau 76,45% dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023 atau 67% fisik, dan terdapat 1 dokumen kerja sama luar negeri yaitu Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Makassar dengan Oriental Consultants Global Co., Ltd. pada Proyek Kelistrikan dan Rantai Dingin Industri Perikanan di Pulau Terpencil di Makassar.

c. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.727.416.900,- sampai bulan Desember Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.318.827.472,- atau 43,83% dengan realisasi fisik 1 (satu) laporan evaluasi pelaksanaan kerja sama atau 100% fisik.

Adapun **faktor pendukung** dari Kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang cukup, kerjasama pimpinan dan staf yang efektif serta koordinasi yang intensif dengan calon mitra/mitra kerjasama dan stakeholder lainnya. Adapun **tindak lanjut** yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

4. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan serta Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu :

- a. **Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.160.532.000,- setelah rasionalisasi dan anggaran perubahan sebesar Rp. 2.469.908.500,- telah terealisasi anggaran keuangan sebesar Rp 1.881.407.628,- atau sebesar 76,58 %, dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai akhir Desember 2023 sebesar 100%.
- b. **Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 641.607.400,- setelah rasionalisasi dan anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 640.954.600,- telah terealisasi anggaran keuangan sebesar Rp 552.420.844,- atau sebesar 86,19% dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2023 sebesar 91,67%.
- c. **Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 701.493.800,- setelah rasionalisasi dan anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 649.404.200,- telah terealisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 583.015.110,- atau sebesar 89,78% sampai bulan Desember Tahun 2023 dan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai akhir tahun 2023 sebesar 91,48%.

Adapun **faktor pendukung** dari program ini adalah koordinasi dan komunikasi dengan BUMD/BLUD dan instansi terkait lainnya yang terjalin dengan baik. Sedangkan **faktor penghambat** adalah dimana kita ketahui ada program prioritas pemerintahan kota yaitu pembentukan Maksassar Incorporate yang penganggarnya cukup besar yang masih berproses revisi setelah menerima hasil penilaian dari kementerian dalam negeri.

Juga masih terbatasnya jumlah pegawai yang malakukan tugas tugas kedinasan yaitu dalam rangka penyelenggaraan pengendalian distribusi serta pengawasan usaha mikro, serta terbatasnya sarana dan prasarana kantor yang ada di bagian perekonomian untuk mendukung optimalnya setiap kegiatan yang kita laksanakan.

Dan **tindak lanjut** yang disarankan melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna mengoptimalkan pencapaian target dan realisasi perencanaan serta mendayagunakan sumber daya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah indikator sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah, akan tetapi indikator pada tabel evaluasi RENJA ini diisi berdasarkan indikator pada RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2021-2016 yaitu

jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi dengan target 1(satu) dokumen. Dokumen yang disusun dalam sub kegiatan ini adalah dokumen evaluasi program.

Dalam sub kegiatan ini dibebankan anggaran untuk pelaksanaan fasilitasi program TSLP/CSR yang berdasar pada Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menjelaskan adanya peralihan Sekretariat Dewan TSLP dari Bappeda kepada Bagian Administrasi Pembangunan. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.004.982.900,- Sampai dengan bulan desember (triwulan IV), kinerja fisik sudah mencapai 100% karena laporan evaluasi program pembangunan telah rampung. Adapun realisasi keuangan berada di angka 91.89% atau sejumlah Rp. 923.433.981,-.

b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator subkegiatan ini berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, sementara nomenklatur pada RENSTRA Sekretariat Tahun 2021-2026 yaitu jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan evaluasi dengan target 1(satu) dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Sub Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.452.711.800,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp.425.201.015,- atau sebesar 93,92% dan realisasi kinerja mencapai 100%.

c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan

Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan didukung dengan anggaran sebesar Rp.453.571.300,- telah terealisasi sejumlah Rp.441.494.937,- atau sebesar 97.34%. Target indikator kinerja yang direncanakan adalah 12 laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi Indikator kinerja pada tabel ini diinput berdasarkan data RENSTRA Sekretariat Tahun 2021-2016 yaitu persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi sismonteptra tepat waktu dengan target 100%. Target ini kemudian dibagi ke dalam 4 triwulan dengan proporsi masing-masing triwulan 25% dan ditargetkan setiap triwulan 100% jumlah SKPD menyampaikan laporan tepat waktu. Realisasi kinerja yang dicapai adalah sebanyak 52 SKPD telah menyampaikan laporan dari triwulan I hingga triwulan IV, sehingga dapat dikatakan bahwa 100% target telah tercapai.

Adapun Faktor yang mendukung pencapaian kinerja dari Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan ini adalah koordinasi-koordinasi yang intensif dengan perangkat-perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

Sementara **faktor penghambat** pencapaian kinerja fisik dan keuangan yaitu sekitar 80% anggaran pada sub kegiatan ini diperuntukkan untuk kegiatan fasilitasi TSLP, sementara pelaksanaan fasilitasi TSLP belum terlaksana sampai dengan akhir triwulan III karena SK Tim Dewan TSLP baru rampung diakhir triwulan III, sehingga berimbas pada keterlambatan penyusunan LPJ kegiatan tersebut. Namun setelah faktor penghambat tersebut dapat diatasi, realisasi keuangan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan mencapai 93,66%. Adapun **tindak lanjut** yang diperlukan adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

3) Pengelolaan Barang dan Jasa

Target kinerja Program untuk Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang di tandatangi pada kuartal pertama adalah sebanyak 5 paket Dengan total pekerjaan konstruksi untuk tahun 2023 adalah sebanyak 8 paket, dengan capaian indikator kinerja program adalah sebesar 62.5%
2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak 3690 paket berbanding jumlah pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode kompetitif sampai dengan bulan Juni sebanyak 2713 paket dengan persentase kinerja sebesar 136 %

Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu

- a. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.557.485.600,- dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp Rp 2.097996.933,-atau sebesar 82.03 %, dengan target kinerja yaitu Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilayani sebanyak 150 paket selama 1 tahun dengan capaian sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu sebanyak 122 paket yang telah dilayani dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik yang didukung oleh anggaran sebesar Rp 1.580.230.600 ,- dengan realisasi keuangan samapai bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.224.434.492 ,- atau sebesar 77,48%. Dengan target kinerja yaitu Jumlah Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Dilaksanakan sebanyak 7 fungsi layanan dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 7 fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ,dengan capaian kinerja sebesar 100 %.
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung oleh anggaran sebesar Rp1.503.811.200,- dengan realisasi keuangan sampai bulan Juni 2023 sebesar Rp 1.184.352.070 ,- atau sebesar 78,76 % Dengan target kinerja pertama yaitu Jumlah bimbingan teknis / Sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 13 Bimtek dengan realisasi capaian sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 13 bimtek telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan target kinerja kedua yaitu Jumlah SKPD Yang meminta untuk mendapatkan Pendampingan Pengadaan Barang/jasa sebanyak 15 SKPD dengan capaian sampai dengan bulan Desember 2023 ada 17 SKPD yang telah mendapatkan pendampingan dalam hal pengadaan barang/jasa dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun **faktor pendukung** pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Tersedianya alokasi anggaran yang cukup serta
- Perencanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik sehingga pelaksanaan dapat dilakukan secara maksimal
- Dukungan sumber daya Pegawai yang cukup tersedia.

Adapun **faktor penghambat** pelaksanaan kegiatan adalah adanya alokasi anggaran yang tidak terealisasi yaitu

- Adanya belanja yang tidak bisa terealisasi dikarenakan waktu pengiriman barang yang tidak bisa di penuhi oleh penyedia yaitu pembelian perangkat firewall dikarenakan waktu pengiriman barang yang cukup lama (pengiriman dari luar negeri) sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sisa belanja rutin yang tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan realisasi belanja.).

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	% REALISASI	
			Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	81,64	86,70
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	93,74	94,80
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	79,42	94,66
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	67,46	77,63
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	59,33	80,49
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	87,24	93,66
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	73,37	88,42
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan/ 100%	83,50	89,63
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	66,45	79,97
	Terpenuhiya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	80,75	74,85
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	87,03	74,18
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	78,15	91,97
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	82,86	79,46
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	94,20	94,45
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	87,84	88,05
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96,30	92,20
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	79,62	77,13
	Terfasilitasinya Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100%	94,36	97,18
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	96,41	88,40
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	86,26	91,10	

Penjelasan Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2020 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Pemerintahan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (5.06%).
2. Capaian dari indicator Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (1.06%).
3. Capaian dari indicator Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (15.24%).
4. Capaian dari indicator Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (10.17%).
5. Capaian dari indicator Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (21.16%).
6. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Pembangunan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (6.42%).
7. Capaian dari indicator Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (15.05%).
8. Capaian dari indicator Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (6.13%).
9. Capaian dari indicator Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (13.52%).
10. Capaian dari indicator Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (5.90%).
11. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (12.85%).
12. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (13.82%).
13. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (3.40%).
14. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (0.25%).
15. Capaian dari indicator Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (0.21%).
16. Capaian dari indicator Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (4.10%).
17. Capaian dari indicator Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (2.49%).
18. Capaian dari indicator Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (2,82%).

19. Capaian dari indikator Terlaksananya Penataan Organisasi tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (8.01%).

20. Capaian dari indikator Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (4.84%).

Dari penjelasan diatas bahwa, apabila dirata-ratakan antara kenaikan dan penurunan Indikator Capaian Kinerja maka tetap akan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 79.01% dari tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	% REALISASI			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
			Tahun 2022	Tahun 2023	Progres Kinerja	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	81,64%	86,70	86,70	-47,96
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan (100%)	89,85	93,74	93,74	-9,13
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	68,59	79,42	79,42	-74,10
	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	78,64	67,46	67,46	-58,12
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	66,56	59,33	59,33	-83,32
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan (100%)	87,75	87,24	87,24	-70,13
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	3 level	3 level	100,00	0,00
	Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan (100%)	76,16%	83,50	83,50	-63,23
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,44%	66,45	66,45	-78,85
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	95,42%	80,75	80,75	-72,43
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	50,87%	87,03	87,03	-79,13
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	84,77%	78,15	78,15	-47,69
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48,11%	82,86	82,86	-78,59
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	82,31%	94,20	94,20	-16,03
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89,93%	87,84	87,84	-4,18
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,00%	96,30	96,30	-45,76
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	58,10%	79,62	79,62	-58,15
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	91,53%	94,36	94,36	-14,75
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	82,88%	96,41	96,41	-67,81
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	80,19%	86,26	86,26	-70,77

Dari tabel Perbandingan Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA bahwa, untuk dapat mencapai target Indikator Capaian Kinerja sampai tahun akhir RPJMD/Renstra maka, masih terdapat kekurangan capaian kinerja dengan rata-rata sebesar (55.69%).

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.

Apabila disusun perbandingannya antara realisasi kinerja Sekretariat daerah Kota Makassar dengan realisasi nasional, maka tidak terdapat tabel yang dapat disajikan, dikarenakan realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah tidak diukur secara nasional.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 tidak dapat disajikan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %	
1	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kelembagaan	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan PKK	153 Kelurahan	100%	83,61	100,00	-
		Terselenggaranya pembinaan LPM dan peningkatan peran kelembagaan dalam kegiatan pengembangan keuangan	153 Kelurahan	100%	98,74	100,00	-
		Terselenggaranya sayembara dan pembinaan kelompok TTG	15 Kelompok	100%	98,27	100,00	-
2	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100%	86,23	100,00	-
		Tersedianya dokumen RKA yang tersusun	60 Dokumen		58,65	100,00	
		Tersedianya dokumen DPA yang tersusun	60 Dokumen	100%	70,94	100,00	-
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Kegiatan	100%	78,51	100,00	-
		Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	100%	74,28	100,00	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	100%	74,39	50,00	-
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	12 Bulan	100%	84,71	100,00	-
		Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan	100 %	100%	83,18	100,00	-
		Tersedianya Anggaran Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	6 Laporan	100%	68,85	100,00	-
		Tersedianya Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	10 Kegiatan	100%	33,49	100,00	-
		Terselenggaranya Penatausahaan Pelaporan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	100%	77,70	100,00	-
		Tersedianya Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi yang disusun	1 Laporan	100%		100,00	-
		Tersedianya Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	12 Bulan	100%	89,11	100,00	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	100%	-	-	-
		Tersedianya Bulan Penyediaan Dana BOP KDH/WKDH	12 Bulan	100%	75,22	100,00	-
3	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100%	86,52	300,00	-
		Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	100%	93,57	300,00	-
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	2192 Stel/ Pasang	100%	93,26	124,41	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	100%	59,29	50,83	-
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan gedung yang diadakan	36 Jenis	100%	66,13	100,00	-
		Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	30 Jenis	100%			-
		Tersedianya Bahan Bacaan yang disediakan	2112 Exlemper	100%	50,21	81,39	-
		Terselenggaranya Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar	200 Kunjungan	100%	99,75	109,50	-
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	141 Perjalanan	100%	54,05	14,18	-
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 Unit	100%			-
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	Unit	100%	87,09	64,00	-
		Tersedianya Mebel yang diadakan	10 Jenis	100%	93,93	140,00	-
		Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	17 Jenis	100%	90,01	888,24	-
		Tersedianya Surat Masuk dan Surat Keluar yang tersedia	10500 Surat	100%	86,19	47,10	-
		Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	100%	60,30	75,00	-
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	100%	99,30	46,67	-
		Tersedianya Tenaga Kebersihan yang terlibat dalam kebersihan kantor	300 Orang	100%	97,24	66,67	-
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara	10 Unit	100%	74,86	90,00	-
		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara	439 Unit	100%	69,42	66,74	-
		Tersedianya Mebel yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 Gedung	100%			-

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %	
		Tersedianya Bangunan/Gedung yang Peralatan dan Mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	6 Bangunan	100%	87,80	100,00	-
		Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6 Bangunan	100%	87,53	16,67	-
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Rumah	100%	97,46	75,00	-
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Rumah	100%	93,47	75,00	-
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Rumah	100%	98,78	75,00	-
4	Terlaksananya penataan administrasi	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan	5 Dokumen	100%	95,80	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dilaksanakan	4 Dokumen	100%	75,64	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	2 Dokumen	100%	97,79	100,00	-
5	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan Pemerintah Kota Makassar	Terselenggaranya Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan Keprotokoleran	840 Pelayanan	100%	86,78	93,26	-
		Terselenggaranya Fasilitasi, Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	320 Pelayanan	100%	98,75	92,50	-
		Terselenggaranya Pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	240 Dokumen	100%	96,07	97,,92	-
6	Terlaksananya administrasi Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen				
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4 Laporan				
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	4 Kegiatan	100%	87,63	100,00	-
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum Komunikasi, Pimpinan Daerah dengan Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah	12 Kegiatan				
		Terselenggaranya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	2 Laporan				
		Terselenggaranya Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan wilayah	5 Kecamatan/ Kelurahan				
		Terselenggaranya Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan batas wilayah	42 Kecamatan/ Kelurahan				
		Terselenggaranya Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi toponimi dan Pemetaan wilayah	168 Kecamatan/ Kelurahan				
		Tersedianya dokumen penetapan kode dan data Kewilayahan	1 Laporan	100%	91,92	100,00	-
		Tersedianya Keputusan Pelimpahan kewenangan Walikota pada Camat	4 Dokumen				
		Terselenggaranya Kelurahan yang dilakukan pemantapan penyelenggaraan dana Kelurahan	153 Kelurahan				
		Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	15 Laporan				

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	100,00%	REALISASI NASIONAL %	
		Tersedianya Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	100%	81,69	100,00	-
		Tersedianya Laporan Hasil Pengukuran standar Pelayanan Minimal	1 Laporan				
		Jumlah usul dan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah	4 Dokumen				
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	1 Laporan				
		Tersedianya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan				
7	Terlaksananya dan dievaluasinya kebijakan kesejahteraan rakyat	Terselenggaranya Pengelolaan Bina Mental Spiritual Yang Difasilitasi	20 Kegiatan	100%	94,93	100,00	-
		Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Dievaluasi	5 Kebijakan	100%	84,30	100,00	-
		Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Sosial yang Dievaluasi	5 Kebijakan	100%	89,97	100,00	-
8	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Terselenggaranya Penyusunan Produk Hukum yang Difasilitasi	10 Ranperda	100%	94,23	58,33	-
		Terselenggaranya Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar	12 Perkara	100%	95,20	89,17	-
		Terselenggaranya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	400 Produk Hukum	100%	94,12	142,86	-
9	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri	Tersedianya Dokumen Kerjasama Dalam Negeri Yang Ditandatangani	20 Dokumen	100%	81,32	200,00	-
		Tersedianya Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang Mempunyai Rekomendasi dari Tim Koordinasi	20 Dokumen				
		Terselenggaranya Kesepakatan Kerjasama yang Tercapai	20 Dokumen				
		Terselenggaranya Forum Investasi Luar Negeri	1 Forum Kerjasama	100%	76,45	100,00	-
		Tersedianya Potensi Kerjasama Investasi yang diinventarisir Luar Negeri	1 Dokumen Kerjasama				
		Tersedianya MoU yang ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama	1 Laporan				
		Buku Potensi Kerjasama	100 Eksemplar	100%	43,83	100,00	-
		Tersedianya Laporan dan Data Kerjasama Secara Berkala yang Didokumentasikan	1 Laporan				
		Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	1 Laporan				
10	Terlaksananya kebijakan perekonomian	Tersedianya Dokumen/Laporan Kinerja Manajemen BUMD	5 BUMD	100%	76,58	69,00	-
		Tersedianya Dokumen/Laporan Kinerja Manajemen BLUD	20 BLUD				
		Assesment BUMD/BLUD	1 Kegiatan				
		Terselenggaranya Peserta kegiatan sosialisasi / FGD / Bimtek / Rapat koordinasi	160 Orang				
		Kajian Pengelolaan BUMD/BLUD	3 Kajian				
		Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMD (Coorporate Plan) RKAP BUMD	6 BUMD				
		Penataan total BUMD	2 Kegiatan				
		Tersedianya Laporan Evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	100%	86,19	86,10	-
		Terselenggaranya Peserta Sosialisasi/Bintek/FGD Perencanaan dan Pengendalian Perekonomian	160 Orang				
		Terselenggaranya rapat koordinasi TPID	2 Kegiatan				
		Tersedianya Dokumen/Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Laporan	100%	89,78	83,11	-
		Terselenggaranya Peserta Sosialisasi/Bintek/FGD Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kajian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	160 Orang				
		Terselenggaranya rapat koordinasi TPKAD	2 Kegiatan				

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %
11	Terlaksananya administrasi pembangunan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program Pembangunan yang Difasilitasi	1 Dokumen	100%	91,89	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Program Pembangunan yang Dikendalikan dan Dievaluasi	1 Dokumen	100%	93,92	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	1 Dokumen	100%	97,34	100,00	-
12	Terlaksananya manuritas/kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa	Tersedianya Paket Pra Tender Pemerintah Kota Makassar Diverifikasi	300 Paket	100%	82,03	195,33	-
		Tersedianya Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang Dilayani	300 Paket				
		Asistensi Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	7 Fungsi Layanan	100%	77,48	100,00	-
		Tersedianya Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dilaksanakan	7 Fungsi Layanan				
		Tersedianya Laporan Evaluasi Pengembangan Penyerapan Anggaran Kota Makassar	12 Laporan	100%	78,76	100,00	-
		Tersedianya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar yang Dipantau	300 Paket				
		Terselenggaranya Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	124 Orang				
		Terselenggaranya Peserta Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	248 Orang				
		Terselenggaranya Peserta Sosialisasi peraturan Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	248 Orang				
Terselenggaranya Peserta Bimbingan Operasional Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	140 Orang						

Berdasarkan table diatas Indikator-indikator pada Sekretariat Daerah Kota Makassar tidak menggunakan atau mengacu pada standard nasional sehingga pada masing-masing indikatornya tidak terdapat realisasi kinerja .

e) Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			CAPAIAN KINERJA %	ALOKASI (RP)	CAPAIAN ANGGARAN (RP)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	95,00%	8.418.205.500	7.298.760.519	86,70
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	100,00%	59.218.655.500	56.137.264.496	94,80
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	58,33%	3.913.923.600	3.705.017.870	94,66
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%		12.422.270.500	9.643.531.714	77,63
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%		3.760.267.300	3.026.790.741	80,49
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	68,77%	1.911.266.000	1.790.129.933	93,66
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	200,00%	5.641.527.400	4.506.783.495	79,89
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan/ 100%	100,00%	22.704.059.200	20.350.109.802	89,63

Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	100,00%	365.183.570	292.040.004	79,97
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	100,00%	43.669.353.022	32.686.448.873	74,85
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100,00%	3.303.174.720	2.450.130.710	74,18
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		6.686.868.796	6.149.993.478	91,97
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		4.638.830.000	3.686.078.287	79,46
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		31.862.299.000	30.094.480.785	94,45
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		50.365.428.352	44.345.221.747	88,05
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		34.352.820.400	31.674.553.048	92,20
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		23.712.528.144	18.288.998.176	77,13
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%		39.278.482.380	38.170.701.662	97,18
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%		2.266.205.600	2.003.273.589	88,40
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%		25.642.066.220	23.360.439.644	91,10

f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN (RP)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	100,00%	86,70	1,15
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	100,00%	94,80	1,05
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	97,78%	94,66	1,03
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	88,89%	77,63	1,15
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	94,38%	80,49	1,17
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	100,00%	93,66	1,07
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	100,00%	79,89	1,25
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan/ 100%	100,00%	89,63	1,12
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	100,00%	79,97	1,25
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	91,67%	74,85	1,22
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	66,67%	74,18	0,90
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100,00%	91,97	1,09
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	87,62%	79,46	1,10
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	76,27%	94,45	0,84
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	376,08%	88,05	4,27
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	58,86%	92,20	0,64
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	68,35%	77,13	0,89
	Terfasilitasinya Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100%	75,00%	97,18	0,77
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	100,00%	88,40	1,13
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	94,56%	91,10	1,04

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran pada dasarnya merupakan rasio antara output yang merupakan realisasi kinerja organisasi, dengan input. Rumus dasar perhitungan efisiensi adalah sebagai berikut

$$\text{Indeks Efisiensi} = \frac{\text{persentase rata - rata realisasi output}}{\text{persentase realisasi anggaran}}$$

Interval dari nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

(<1) = Tidak efisien;

(=1) = Berimbang; dan

(>1) = Efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja pada tahun 2023 Sasaran kinerja; Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan Efisien karena rata-rata indeks efisiensi di masing-masing indikator telah lebih dari satu. Kemudian pada sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan terdapat 5 indikator yang belum dinyatakan efisien sementara terdapat 7 indikator yang telah dinyatakan efisien sehingga Sekretariat Daerah Kota Makassar terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing indikatornya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Makassar tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 2022 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Total alokasi anggaran untuk belanja operasi berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial pada pada Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah **Rp.336.361.615.222,-** dengan realisasi **Rp.298.163.925.932,-** (88,64%).

b. Belanja Modal

Total alokasi anggaran untuk belanja modal Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa belanja peralatan dan mesin dan belanja aset lainnya adalah sebesar **Rp.47.771.799.982,-** dengan realisasi sebesar Rp. **41.507.814.947,-** (86,89%).

Gambaran situasi anggaran yang dialokasikan di Sekretariat Daerah selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
 Realisasi Belanja sesuai anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah
 Tahun Anggaran 2023.

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Rp)	Persentase
1.	Belanja Operasi	336.361.615.222	298.163.925.932	88.64
	- Belanja Pegawai	45.010.742.142	33.823.595.493	75,15
	- Belanja Barang / Jasa	253.564.717.080	228.429.174.439	90.09
	- Belanja Hibah	37.789.165.000	35.911.156.000	95.04
	- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.	Belanja Modal	47.771.799.982	41.507.814.947	86.89
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.771.799.982	41.507.814.947	86.89
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja	384.133.415.204	339.671.740.879	88.43

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2021-2026 Kota Makassar, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum tidak memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian yang dihasilkan adalah 94.62% (tinggi). Dengan demikian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah dapat diwujudkan.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari sistem perencanaan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tantangan bagi Sekretariat Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023 yaitu dengan lebih fokus terhadap sasaran dan program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi semaksimal mungkin dalam menyelesaikan sarana, program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih kecil. Untuk itu perlu kiranya memperkuat tugas dan fungsi setiap Bagian dan meningkatkan kapasitas aparatur sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam merumuskan kebijakan sebagai bentuk dalam memenuhi tuntutan tantangan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023 Otelah memenuhi kewajiban akuntabilitas. Jika masih ada hal-hal yang dalam

penyelenggaraan laporan ini, akan dijadikan bahan introspeksi agar dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimasa yang akan datang sehingga diharapkan LAKIP ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

**EVALUASI HASIL KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)												
1	2	3	4	4.a	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Persentase PKK Aktif	%	100	Rp 23.107.287.100	Rp 22.704.059.200	Rp8.273.100.000,00	Rp4.437.190.200,00	Rp3.259.819.606,00	100	100,00	Rp20.350.109.802,00	0,00%	89,63%	0,00	Rp20.350.109.802,00										
				%	100						100	100,00		0,00%													
	13.05.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Kegiatan- Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan di 153 Kelurahan	Kelurahan	153	Rp 23.107.287.100	Rp 22.704.059.200	Rp8.273.100.000,00	Rp4.437.190.200,00	Rp3.259.819.606,00	153	Rp4.379.999.996,00	153,00	Rp20.350.109.802,00	100,00%	89,63%	154,00	Rp40.306.294.843,00	30,80%	60,22					Kasubag Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
	1	13.05.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	153	Rp 13.683.130.900	Rp 13.589.988.600	0	Rp8.090.300.000,00	0	Rp956.475.000,00	0	Rp1.123.305.606,00	153	Rp1.192.804.415,00	153	Rp11.362.885.021,00	100,00%	83,61%	0,00%	Rp21.888.546.385,00	0,00%	42,62		Kasubag Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	2	13.05.2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	153	Rp 6.633.554.800	Rp 6.565.957.200	0	Rp92.600.000,00	0	2.228.775.700,00	0	1.570.360.000,00	153	2.591.576.564,00	153	Rp6.483.312.264,00	100,00%	98,74%	0,00%	Rp13.295.839.816,00	0,00%	88,31		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	3	13.05.2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kelompok TTG	15	Rp 2.790.601.400	Rp 2.548.113.400	0	Rp90.200.000,00	0	1.251.939.500,00	0	566.154.000,00	15	595.619.017,00	15	Rp2.503.912.517,00	100,00%	98,27%	0,00%	Rp5.121.908.642,00	0,00%	1004,70		Kasubag Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA		I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.			
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		K		Rp.		K				Rp.			
1	2	3	4	4.a	7				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																													
2.13	SEKRETARIAT DAERAH																													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100			34			5			15			46			100,00		100,00%	87,62%	200,00	Rp267.189.135.958,00	200,00%	110,50	Bagian Perencanaan dan Keuangan		
			Indeks Kepuasan Pelayanan yang di Fasilitas dan dilaksanakan oleh sekretariat daerah	%	100													100			100,00		100,00%							
			Persentase Pengelolaan BMD dan Aset lainnya yang mendukung produktivitas Sekretariat Daerah	%	80	Rp 240.864.283.028	Rp 266.143.240.204		Rp5.290.382.357,00		Rp10.768.129.198,00			Rp9.078.701.990,00			Rp10.291.406.042,00			80,00	Rp 233.202.360.003		100,00%							
			Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	%	30													30			30,00		100,00%							
			Persentase penataan organisasi dan ketatalaksanaan	%	100													100			100,00		100,00%							
			Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan	%	100				12,97		25,08			28,31			26,69			93,05		93,05%	0,00%							Bagian Protokol
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	Rp 349.339.000	Rp 365.183.570	34	Rp29.859.090,00	5	Rp49.432.000,00	15	Rp62.916.000,00	46	Rp149.832.914,00	100,00	Rp292.040.004	100,00%	83,60%	101,00	Rp515.515.995,00	20,20%	21,15	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp 226.586.200	Rp 222.173.800	1	Rp29.859.090,00	0	Rp38.237.000,00	0	Rp39.176.000,00	1	Rp84.297.914,00	2	Rp191.570.004,00	100,00%	86,23%	3,00	Rp336.359.145,00	15,00%	22,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	60	Rp 31.632.500	Rp 33.701.970	30	Rp0,00	0		0	15		0	15	Rp19.766.000,00	60	Rp19.766.000,00	100,00%	58,65%	61,00	Rp48.514.000,00	20,33%	20,19	Bagian Perencanaan dan Keuangan				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	25	Rp 23.945.500	Rp 45.595.000	15	Rp0,00	0	Rp2.400.000,00	5	Rp7.505.000,00	5	Rp22.439.000,00	25	Rp32.344.000,00	100,00%	70,94%	26,00	Rp47.463.250,00	20,80%	16,92	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	Rp 26.246.300	Rp 24.422.300	1	Rp0,00	1	Rp6.395.000,00	1	Rp11.105.000,00	3	Rp19.173.500,00	100,00%	78,51%	4,00	Rp39.276.500,00	26,67%	17,56	Bagian Perencanaan dan Keuangan								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp 40.928.500	Rp 39.290.500	1	Rp0,00	1	Rp2.400.000,00	1	Rp5.130.000,00	1	Rp21.656.500,00	4	Rp29.186.500,00	100,00%	74,28%	5,00	Rp43.903.100,00	25,00%	26,76	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	Rp 46.947.383.887	Rp 43.669.353.022	22	Rp4.917.696.235,00	22	Rp10.133.845.046,00	25	Rp8.461.164.958,00	22	Rp9.173.742.634,00	91	Rp32.686.448.873	91,00%	69,62%	191,00	Rp63.986.926.549,00	38,20%	29,08	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	Rp 42.912.530.387	Rp 39.846.447.422	3	Rp4.350.126.235,00	5	Rp9.394.647.908,00	3	Rp7.844.437.958,00	3	Rp8.051.032.682,00	14	Rp29.640.244.783,00	100,00%	74,39%	8,00	Rp42.531.959.454,00	11,43%	21,49	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	Rp 2.586.465.000	Rp 2.265.115.800	3	Rp432.570.000,00	3	Rp531.451.601,00	3	Rp437.130.000,00	3	Rp517.532.377,00	12	Rp1.918.683.978,00	100,00%	84,71%	13,00	Rp3.524.611.828,00	21,67%	23,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persen	100	Rp 908.163.600	Rp 930.391.300	5	Rp117.000.000,00	13	Rp189.745.537,00	43	Rp125.408.000,00	39	Rp341.711.609,00	100	Rp773.865.146,00	100,00%	83,18%	101,00	Rp1.405.088.475,00	101,00%	36,06	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	Rp 32.255.200	Rp 34.755.200	5	Rp0,00	0		0	Rp4.189.000,00	0	Rp19.738.500,00	5	Rp23.927.500,00	100,00%	68,85%	6,00	Rp39.642.550,00	24,00%	11,93	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	kegiatan	4	Rp 220.721.000	Rp 295.721.000	2	Rp0,00	0		0		0	Rp99.024.600,00	2	Rp99.024.600,00	50,00%	33,49%	3,00	Rp249.259.800,00	15,00%	17,70	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 287.248.700	Rp 296.922.300	3	Rp18.000.000,00	3	Rp18.000.000,00	3	Rp50.000.000,00	3	Rp144.702.866,00	12	Rp230.702.866,00	100,00%	77,70%	13,00	Rp340.893.802,00	21,67%	29,59	Bagian Perencanaan dan Keuangan						

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					K		Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K				Rp.								
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	4.a	7				8				9				10				11				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	Rp 24.567.278.244	Rp 23.712.528.144	Rp 96.400.000	Rp 4.910.242.199	Rp5.711.964.991,00	Rp7.570.390.986,00	0,00	Rp18.288.998.176,00																					Bagian Umum	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	Rp 1.315.597.150	Rp 1.315.597.150	Rp7.000.000,00	Rp370.936.500,00	9	Rp212.268.050,00		Rp394.649.939,00	9,00	Rp984.854.489,00	90,00	74,86	10,00	Rp1.870.635.292,00	20,00	38,43													Bagian Umum	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	439	Rp 12.407.891.250	Rp 12.738.891.250	24	Rp23.000.000,00	84	Rp3.026.072.649,00	185	Rp1.843.730.231,00		Rp3.950.673.903,00	293,00	Rp8.843.476.783,00	66,74	69,42	293,42	Rp15.336.704.702,00	13,37	44,60										Bagian Umum		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangunan	6	Rp 2.082.339.400	Rp 2.657.669.400		Rp555.064.500,00	6	Rp724.534.320,00		Rp1.053.745.300,00	6,00	Rp2.333.344.120,00	100,00	87,80	7,00	Rp3.514.876.996,00	23,33	54,73												Bagian Umum		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	Rp 8.761.450.444	Rp 7.000.370.344		Rp66.400.000,00	1	Rp958.168.550,00		Rp2.931.432.390,00	1,00	Rp6.127.322.784,00	16,67	87,53	2,00	Rp10.586.556.010,00	6,67	60,88													Bagian Umum	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	% Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	Rp 3.464.128.720	Rp 3.303.174.720	16	Rp342.827.032	18	Rp584.852.152	16	Rp554.621.032	16	Rp967.830.494	66,00	Rp2.450.130.710	66,00%	74,18%	166,00	Rp4.912.952.998,00	#ERROR!	25,42										#VALUE!		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	14	Rp 184.128.720	Rp 185.128.720	3	Rp37.861.032	5	Rp63.096.152	3	Rp37.861.032	3	Rp26.147.494	14	Rp164.965.710	100,00%	89,11%	15,00	Rp340.822.698,00	3,00%	34,71										Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	0	Rp0,00	0	0	0	0	0	0	Rp0,00	0,00%	0,00%	1,00	Rp0,00	0,20%	0,00											Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	12	Rp 3.200.000.000	Rp 3.038.046.000	3	Rp304.966.000	3	Rp521.756.000	3	Rp516.760.000	3	Rp941.683.000	12	Rp2.285.165.000	100,00%	75,22%	13,00	Rp4.572.130.300,00	2,60%	25,54										Bagian Perencanaan dan Keuangan		
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	% Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	Rp 29.803.423.870	Rp 39.278.482.380	25	Rp 753.900.000	25	Rp 10.328.453.806	Rp10.460.606.085,00	Rp16.627.741.771,00	50,00	Rp 38.170.701.662	50,00	97,18	150,00	Rp65.999.266.517,00	150,00	146,90													Bagian Umum	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	Rp 10.021.500.500	Rp 13.908.474.700	0,25		0,25	Rp2.997.965.230,00	0,25	Rp4.788.842.700,00		Rp5.768.914.070,00	0,75	Rp13.555.722.000,00	75,00	97,46	1,75	Rp21.094.180.775,00	35,00	78,69										Bagian Umum		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	Rp 6.855.413.440	Rp 8.377.601.540	0,25		0,25	Rp1.995.982.550,00	0,25	Rp2.358.162.225,00		Rp3.476.057.280,00	0,75	Rp7.830.202.055,00	75,00	93,47	1,75	Rp12.094.328.878,00	35,00	111,68										Bagian Umum		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	Rp 12.926.509.930	Rp 16.992.406.140	0,25	Rp753.900.000,00	0,25	Rp5.334.506.026,00	0,25	Rp3.313.601.160,00		Rp7.382.770.421,00	0,75	Rp16.784.777.607,00	75,00	98,78	1,75	Rp32.810.756.864,00	35,00	449,91										Bagian Umum		
		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	%	100	Rp 2.931.674.800	Rp 2.266.205.600	16,67	Rp128.334.712	25	Rp366.319.435	16,67	Rp463.226.539,00	41,6	Rp1.045.392.903	100	Rp2.003.273.589	99,94	68,33	199,94	Rp4.120.206.897	199,94	33,86										Bagian Organisasi		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	Rp 690.601.800	Rp 650.061.800	0	Rp 48.321.962	1	Rp60.237.500	1	Rp98.962.718	3	Rp415.233.816	5	Rp622.755.996,00	100,00	90,18	10,00	Rp 1.123.837.315	40,00	40,04										Bagian Organisasi		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	Rp 1.526.698.900	Rp 902.340.900	2	Rp 33.348.550	1	Rp224.106.935	1	Rp154.605.645	1	Rp270.436.219	5	Rp682.497.349,00	100,00	44,70	10,00	Rp 1.805.416.291	40,00	27,61										Bagian Organisasi		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	Rp 714.374.100	Rp 713.802.900	0	Rp 46.664.200	1	Rp81.975.000	0	Rp209.658.176	1	Rp359.722.868	2	Rp698.020.244,00	100,00	97,71	4,00	Rp 1.190.953.291	40,00	42,22										Bagian Organisasi		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket								
					K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)				K	Rp.						
1	2	3	4	4.a	7				8				9				10				11				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelayanan Fasilitas Keptokoleran dan Dokumentasi Pimpinan Pemerintahan Kota Makassar	Pelayanan	1180	Rp 25.642.066.220	Rp 25.642.066.220	153	Rp1.530.777.480	296	Rp6.171.964.260	334	Rp6.365.150.541,00	315	Rp9.292.547.363,00	1.098	Rp23.360.439.644	93,05	91,10	2.206,00	Rp45.425.927.939,00	38,03	34,78	Bagian Protokol										
		Fasilitasi Keptokoleran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keptokoleran Jumlah Pelayanan Fasilitas Keptokoleran Pemerintahan Kota Makassar yang mendapat Layanan Keptokoleran	Laporan Pelayanan	860	Rp 13.834.513.920	Rp 13.834.513.920	119	Rp1.191.852.480,00	214	Rp2.912.194.260,00	243	Rp3.105.650.541,00	226	Rp4.795.745.675,00	802	Rp12.005.442.956,00	93,26	86,78	1.599	Rp22.772.580.163,00	38,07	38,81	Bagian Protokol										
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang Dilaksanakan	Pelayanan	320	Rp 440.757.100	Rp 440.757.100	34	Rp96.670.000,00	82	Rp103.520.000,00	91	Rp94.500.000,00	89	Rp140.547.750,00	296	Rp435.237.750,00	92,50	98,75	607	Rp865.138.646,00	37,94	35,77	Bagian Protokol										
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	240	Rp 11.366.795.200	Rp 11.366.795.200	38	Rp242.255.000,00	59	Rp3.156.250.000,00	74	Rp3.165.000.000,00	64	Rp4.356.253.938,00	235	Rp10.919.758.938,00	97,92	96,07	452	Rp21.788.209.130,00	37,67	20,99	Bagian Protokol										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	%	100								100		100,00																			
			Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	Rp 87.066.728.500	Rp 83.973.055.100	0	Rp13.089.924.059,00	0	Rp20.421.513.830	25	Rp21.194.324.882,00	33,33	Rp22.078.811.828,00	58,33	Rp33.511.437.889,00	39,91%		198,04		Rp 99.107.526.744	198,04%	6,60										
			Cakupan Produk Hukum Daerah	%	100			0		0																								
			Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan	%	90			0		160		0		50		210,00																		
		Administrasi Tata Pemerintahan	% Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	%	100	Rp 8.671.229.500	Rp 8.418.205.500	42	Rp211.707.355	22	Rp3.391.149.883	31	Rp1.916.573.862,00		Rp1.779.329.419,00	95	Rp7.298.760.519	95,00	86,70	195,00	Rp15.969.990.019,00	195,00	105,52	Bagian Tapem										
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	Rp 281.524.200	Rp 230.389.800	1	Rp34.500.000,00	0	Rp34.740.000,00	0	Rp38.422.000,00	1	Rp94.226.324,00	2	Rp201.888.324,00	100,00	71,71	7	Rp483.412.524,00	23,33	17,33	Bagian Tapem										
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	4	Rp 4.256.149.500	Rp 3.993.863.500	1	Rp42.000.000,00	1	Rp870.250.000,00	1	Rp1.513.401.500,00	1	Rp1.245.329.423,00	4	Rp3.670.980.923,00	100,00	86,25	9	Rp7.927.130.423,00	30,00	107,10	Bagian Tapem										
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	5	Rp 4.133.555.800	Rp 4.193.952.200	2	Rp135.207.355,00	1	Rp2.486.159.883,00	1	Rp364.750.362,00	1	Rp439.773.672,00	5	Rp3.425.891.272,00	100,00	82,88	10	Rp7.559.447.072,00	33,33	20,99	Bagian Tapem										
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan	27	Rp 60.850.036.300	Rp 59.218.655.500		Rp12.392.000.000	6	Rp15.829.492.680	12	Rp11.163.634.017	9	Rp16.752.137.799	27	Rp56.137.264.496	100,00%	94,80%	122,00	Rp56.137.264.496	90,37	3,83	Bagian Kesra										
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1				Rp12.320.000.000		Rp15.743.002.680		Rp10.625.358.937		Rp16.568.442.761	1	Rp55.256.804.378	100,00%	94,93%	23,00	Rp55.256.804.378	20,91	20,58	Bagian Kesra										
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	21	Rp 59.800.360.400	Rp 58.205.003.400			11				10											Bagian Kesra									
		Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Kebijakan																														
			Jumlah pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Kebijakan	5	Rp 556.359.700	Rp 555.625.300		Rp31.500.000	1	Rp59.490.000	2	Rp333.098.480	2	Rp44.300.122	5	Rp468.388.602	100,00%	84,30%	84,30%	Rp468.388.602	2,41	22,15	Bagian Kesra										
		Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Kebijakan																														
				Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan	5	Rp 493.316.200	Rp 458.026.800		Rp40.500.000,00	1	Rp27.000.000,00	2	Rp205.176.600,00	2	Rp139.394.916,00	5	Rp412.071.516,00	100,00%	84,30%	84,30%	Rp468.388.602	2,41	61,69	Bagian Kesra									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					K	Rp. (000) RENJA		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)		K			Rp.			
						Rp. (000) DPA			Rp. (000)			Rp. (000)			Rp. (000)			Rp. (000)			Rp. (000)					Rp. (000)		Rp. (000)	
1	2	3	4	4.a	7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah	Persen	100	Rp. 4.516.387.300	Rp. 3.913.923.600	0	Rp365.444.167	0	Rp652.715.293	25	Rp1.289.148.237,00	33,33	Rp1.397.710.173,00	58,33	Rp3.705.017.870,00	58,33%	94,66%		Rp6.354.240.680,00			Bagian Hukum					
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	120	Rp. 1.287.807.200	Rp. 1.257.310.900	3	Rp118.412.320,00	5	Rp273.989.859,00	10	Rp387.861.955,00	98	Rp404.523.133,00	116	Rp1.184.787.267,00	96,67%	94,23%	209	Rp2.386.697.455,00	41,80	28,85	Bagian Hukum					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	7	Rp. 2.291.960.100	Rp. 1.829.045.500	3	Rp148.418.080,00	0	Rp228.868.424,00	0	Rp631.585.522,00	7	Rp732.463.076,00	10	Rp1.741.335.102,00	142,86%	95,20%	22	Rp2.641.516.690,00	36,67	35,10	Bagian Hukum					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	120	Rp. 936.620.000	Rp. 827.567.200	3	Rp98.613.767,00	5	Rp149.857.010,00	10	Rp269.700.760,00	98	Rp260.723.964,00	116	Rp778.895.501,00	96,67%	94,12%	209	Rp1.326.026.535,00	41,80	21,97	Bagian Hukum					
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	% Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	%	100	Rp. 13.029.075.400	Rp. 12.422.270.500		Rp120.772.537		Rp548.155.974		Rp6.824.968.766,00		Rp2.149.634.437,00		Rp9.643.531.714							Bagian Kerja Sama					
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	20	Rp. 8.136.733.900	Rp. 7.892.855.500	14	18	8	4	44	220,00%	64,00	Rp9.719.853.214,00	64,00	Bagian Kerja Sama												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	0										#DIV/0!			Bagian Kerja Sama											
			Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang di tanda tangani	Dokumen Kerjasama	20			14	Rp47.684.360,00	18	Rp369.374.063,00	8	Rp5.446.076.148,00	4	Rp554.957.127,00	220,00%	81,32%	Bagian Kerja Sama											
			Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang mempunyai rekomendasi dari Tim Koordinasi	Dokumen Kerjasama	20										0,00%			Bagian Kerja Sama											
			Jumlah Kesepakatan Kerjasama yang tercapai	Dokumen Kerjasama	20			14		18	8	4	44	220,00%				Bagian Kerja Sama											
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Forum Investasi Luar Negeri	Forum Kerjasama	1	Rp. 4.137.353.400	Rp. 3.801.998.100			1		1	100,00%			Bagian Kerja Sama													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	0										#DIV/0!			Bagian Kerja Sama											
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2			Rp41.588.177,00	1	Rp109.981.911,00	Rp1.279.237.254,00	Rp1.475.805.202,00	1	Rp2.906.612.544,00	50,00%	70,25%	Bagian Kerja Sama												
			Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri	Dokumen Kerjasama	2				1				1		50,00%			Bagian Kerja Sama											
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	Laporan	1									0	0,00%			Bagian Kerja Sama											
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Buku Potensi Kerjasama	Eksemplar	100	Rp. 754.988.100	Rp. 727.416.900					0	0,00%			Bagian Kerja Sama													
			Jumlah Laporan dan Data Kerjasama secara berkala yang di dokumentasikan	Laporan	1								1	1	100,00%			Bagian Kerja Sama											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	0			Rp31.500.000,00		Rp68.800.000,00	Rp99.655.364,00	Rp118.872.108,00	0	Rp318.827.472,00	#DIV/0!	42,23%	Bagian Kerja Sama												
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1								0		0,00%			Bagian Kerja Sama											
			Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Laporan	1								1	1	100,00%			Bagian Kerja Sama											

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K
1	2	3	4	4.a	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	%	100			25	25			25	25			100,00										
			Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ketahuan berikutnya yang ditandatangani pada kwartal pertama	%	100							62,5	62,5			62,50										
			Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	Rp 12.822.691.000	Rp 11.313.060.700	Rp 634.379.350	Rp 1.416.744.089	Rp 2.246.681.752	Rp 5.025.898.978			0,00	Rp9.323.704.169	0,00%	82,42%									
			Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring Tim Evaluasi pengawasan realisasi anggaran (SISMONTEPRA)	%	100			7,53	16,40	18,12	19,84			61,89		61,89%										
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	% Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik	%	100	Rp 3.760.920.100	Rp 3.760.267.300	Rp96.000.000	Rp361.772.789	Rp575.183.863,00	Rp1.993.834.089,00			Rp3.026.790.741			Rp5.796.575.198							Bagian Perekonomian		
		Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen																			Bagian Perekonomian			
			Jumlah laporan kinerja manajemen dan keuangan BUMD dan BLUD	Laporan	26			3	3	10	10			26	100%	26,00							20,00%	Bagian Perekonomian		
			Jumlah pelaksanaan Kegiatan Assessment BUMD dan BLUD	Kegiatan	2	Rp 2.469.908.500	Rp 2.469.908.500	0	Rp36.000.000,00	0	Rp176.953.289,00	0	Rp267.947.193,00	0	Rp1.410.454.305,00	0	Rp1.891.354.787,00	0%	76,58%	0,00	Rp3.703.536.488,00	0,00%	27,66	Bagian Perekonomian		
			Jumlah rapat koordinasi khusus/sosialisasi/workshop/FGD /bintek lingkup BUMD dan BLUD Kota Makassar	Kali	4			1	1	1	1			4	100%	4,00							20,00%	Bagian Perekonomian		
			Tersusunnya Dokumen Bisnis Plan dan corporate plan/RKAP BUMD dan BLUDD	Dokumen	12			3	3	3	3			12	100%	12,00							20,00%	Bagian Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan sosialisasi/FGD terkait pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kegiatan	2			1		1			2	100,00%	70,23								Bagian Perekonomian			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12	Rp 641.607.400	Rp 640.954.600	3	Rp33.000.000,00	3	Rp89.897.500,00	3	Rp149.474.144,00	3	Rp280.049.200,00	12	Rp552.420.844,00	100,00%	86,10%	12,00	Rp1.024.915.919,00		38,89	Bagian Perekonomian		
			Jumlah laporan informasi dan Rekomendasi Distribusi dan Pengendalian Perekonomian	Laporan	2					1	1			2	100,00%	2,00							Bagian Perekonomian			
			Jumlah Rapat koordinasi pengendalian Inflasi Daerah	Kali	4			1	1	1	1			4	100,00%	4,00							Bagian Perekonomian			
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	0									0	#DIV/0!	64,84							Bagian Perekonomian	Indikator kinerja program ini tidak ada direnstra		
			Jumlah laporan informasi dan rekomendasi terkait perencanaan dan pengawasan usaha Mikro Kecil	Laporan	2	Rp 649.404.200	Rp 649.404.200		Rp27.000.000,00	1	Rp94.922.000,00	1	Rp157.762.526,00	1	Rp303.330.584,00	2	Rp583.015.110,00	100,00%	89,78%	2,00	Rp1.068.122.791,00		36,74	Bagian Perekonomian		
			Jumlah Peserta yang di Edukasi	Orang	180			45	45	45	45			180	100,00%	180,00								Bagian Perekonomian		
			Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	4			1	1	1	1			3	75,00%	3,00								Bagian Perekonomian		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.
					7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17										
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase penyerapan realisasi anggaran melalui SISMONTEPRA	%	90	Rp 3.062.315.700	Rp 1.911.266.000	7,53	Rp164.890.200,00	16,40	Rp137.185.300,00	18,12	Rp458.293.989,00	19,84	Rp1.029.760.444,00	61,89	Rp 1.790.129.933	68,77%	93,66%	144,28	Rp 2.724.748.755	160,31%	45,47	Bagian Adpem	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Dokumen	1	Rp 2.143.773.500	Rp 1.004.982.900	0	Rp27.000.000,00	0	Rp59.278.000	0	Rp225.267.862	1	Rp611.888.119	1	Rp923.433.981,00	100,00%	91,89%	2,00	Rp 1.282.360.935	40,00%	77,18	Bagian Adpem	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi	Dokumen																					
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Laporan	1	Rp 463.975.600	Rp 452.711.800	0	Rp74.723.200,00	0	Rp38.866.000	0	Rp117.852.200	1	Rp193.759.615	1	Rp425.201.015,00	100,00%	93,92%	2,00	Rp 725.855.973	40,00%	33,80	Bagian Adpem	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi	Dokumen																					
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	1	Rp 454.566.600	Rp 453.571.300	25	Rp63.167.000,00	25	Rp39.041.300	25	Rp115.173.927	25	Rp224.112.710	100	Rp441.494.937,00	100,00%	97,34%	100,00	Rp 716.531.847	100,00%	32,82	Bagian Adpem	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi sismontepra tepat waktu	Persen	100																				
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level	3	Rp 5.999.455.200	Rp 5.641.527.400	0	Rp373.489.150,00	2	Rp917.786.000,00	4	Rp1.213.203.900,00		Rp2.002.304.445,00	6	Rp4.506.783.495,00	200,00%	79,89%	7	Rp8.839.841.966,00	23333,33%	27,20	Bagian BPBJ	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani	Paket	150	Rp 2.395.948.000	Rp 2.557.485.600	40	Rp209.116.750,00	32	Rp408.446.400,00	4	Rp710.364.550,00	217	Rp770.069.233,00	293	Rp2.097.996.933,00	195,33%	82,03%	579	Rp3.744.431.135,00	5790,00%	33,84	Bagian BPBJ	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah fungsi pengelolaan layanan Pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan	Fungsi Layanan	7	Rp 1.703.506.400	Rp 1.580.230.600	3	Rp105.342.400,00	3	Rp69.883.700,00	1	Rp250.518.800,00		Rp798.689.592,00	7	Rp1.224.434.492,00	100,00%	77,48%	42	Rp2.411.655.026,00	12000,00%	31,47	Bagian BPBJ	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis / Sosialisasi yang dilaksanakan, Jumlah SKPD Yang mendapatkan Pendampingan Barang dan jasa	Kegiatan	14	Rp 1.900.000.800	Rp 1.503.811.200	0	Rp59.030.000,00	6	Rp439.455.900,00	0	Rp252.320.550,00	8	Rp433.545.620,00	14	Rp1.184.352.070,00	100,00%	78,76%	20	Rp2.683.755.805,00	6666,67%	19,48	Bagian BPBJ	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. M. ANSAR, M.Si.
J a b a t a n : Sekretaris Daerah Kota Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. MOH. RAMDHAN POMANTO
Jabatan : Walikota Makassar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. MOH. RAMDHAN POMANTO

Makassar, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

Ir. M. ANSAR, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	100%
		Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	Sangat Tinggi
		Cakupan Produk Hukum Daerah	100%
		Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan	90%
		Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100%
		Persentase PKK Aktif	100%
		Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	15%
		Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100%
		Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	100%
		Persentase Penyerapan Realisasi Anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA)	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100%
		Indeks Kepuasan Pelayanan yang Difasilitasi dan Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah	100%
		Persentase Pengelolaan BMD dan Aset Lainnya yang Mendukung Produktivitas Sekretariat Daerah	80%
		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	40%
		Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100%

1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 83.862.609.500	APBD Kota Makassar T.A.2023
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 22.607.287.100	
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 13.565.404.100	
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 235.542.645.300	
	JUMLAH	Rp.355.577.946.000	

WALIKOTA MAKASSAR,



Ir. MOH. RAMDHAN POMANTO

Makassar, 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. M. ANSAR, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 196305171992031004